



12 Lokasi Wisata di DIY Rawan Macet

► Pengelola wisata diminta menambah personel guna mengurangi potensi antrean pada masa libur mendatang.

► GIPI DIY menyebut hotel *nuthuk* tarif di momen libur Natal dan tahun baru bisa berdampak buruk pada citra wisata Jogja.

JOGJA-Dinas Pariwisata (Dispar) DIY memprediksi sedikitnya 12 lokasi wisata berpotensi macet pada masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

*Yosef Leon, Stefani Yulindriani, & Anisatul Umah
redaksi@harianjogja.com*

Koordinasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub) DIY sudah dilakukan agar jalur alternatif dipersiapkan. Selain itu, pengelola wisata juga diminta menambah personel guna mengurangi potensi antrean pada masa libur mendatang.

Plh Kepala Dispar DIY, Kurniawan, menjelaskan instansinya sudah memetakan titik wisata mana saja yang kemungkinan besar macet pada masa libur panjang akhir tahun.

Total ada 12 titik yang berpotensi macet lantaran padatnya mobilitas wisatawan. Di wilayah Kota Jogja ada di Malioboro dan Kraton. Di Sleman ada di Monjali dan Jakal, juga ada Prambanan, Breksi, dan sekitarnya. Di Kulonprogo ada Ayunan Langit, Sungai Mudal, Waduk Sermo, Kali Biru, dan Pantai Glagah.

12 Lokasi...

"Kemudian di Bantul ada di Pantai Parangtritis dan Depok dengan potensi antrean panjang di loker, Hutan Mangunan. Di Gunungkidul, Pantai Baron serta di sekitaran Heha Ocean View, Gua Pindul, Bukit Bintang, dan Nglangeran juga relatif ramai kemungkinan besar akan macet juga," kata Wawan, Minggu (10/12).

Dispar DIY telah mengimbau kepada pengelola wisata untuk menyiapkan pengaturan pengunjung masuk. "Karena biasanya wisata itu pasti membeludak, sehingga kami mau loket wisata itu ada penambahan petugas sehingga tidak ada antrean panjang," jelasnya.

Wawan juga telah mendaftar sedikitnya ada 30 event yang akan digelar selama masa liburan akhir tahun. "Kami juga akan siapkan *crisis center* untuk memberikan kanal kepada wisatawan jika ada laporan, sehingga mereka tidak liar hanya menyampaikan kekecewaan di medsos, itu bagus untuk *feedback* ke kami langsung," ujarnya.

Ia menyebut tidak ada target khusus pendapatan asli daerah (PAD) sektor wisata di masa libur panjang akhir tahun nanti. Dispar DIY menargetkan 800.000 wisatawan akan berkunjung ke wilayah setempat. "Kami harapkan bisa tercapai karena kami juga ingin tidak terganggu dengan masa kampanye, karena kemarin banyak yang maju eventnya di November karena takut dengan kampanye terbuka."

Tarif Nuthuk

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY menyebut hotel yang menerapkan tarif di luar batas kewajaran alias *nuthuk* di momen libur Natal dan tahun baru bisa berdampak buruk pada citra wisata Jogja. Kenaikan tarif hotel saat *peak season* wajar terjadi sebab ini berkaitan dengan *supply and demand*.

Berdasarkan data dari aplikasi *travel online* tarif hotel bintang lima di Kota Jogja pada 31 Desember 2023 - 1 Januari 2024 ditawarkan Rp2,5 juta hingga Rp2,9 juta. Sementara harga yang ditawarkan selepas tahun baru pada 30-31 Januari 2024 hanya di kisaran Rp1 jutaan.

Sementara untuk hotel bintang tiga pada 31 Desember 2023-1 Januari 2024 tarifnya tidak jauh beda dengan bintang lima yakni kisaran Rp2,4 - Rp2,7 juta. Namun ada juga yang ditawarkan dengan harga Rp1 jutaan. Pada 30-31 Januari 2024, tersedia hotel bintang tiga dengan tarif Rp500.000-600.000.

Ketua GIPI DIY, Bobby Ardianto, mengatakan perbedaan harga antara *low season*, *high season*, dan *peak season* lumrah terjadi selagi masih dalam ambang batas.

Memang di periode tertentu pasti ada sedikit perbedaan harga ini jadi hal yang wajar, tetapi dalam batasan koridor harga yang masuk akal dan *reasonable* untuk itu.

Bobby Ardianto

Ketua GIPI DIY

"Memang di periode tertentu pasti ada sedikit perbedaan harga ini jadi hal yang wajar, tetapi dalam batasan koridor harga yang masuk akal dan *reasonable* untuk itu," ucapnya, Sabtu (9/11).

Di beberapa periode yang berbeda, dimungkinkan terjadi perbedaan harga 10%-15%. Menurut dia, kondisi saat ini sudah lebih baik sebab ada tambahan beberapa hotel baru sehingga kenaikan tidak signifikan sebelumnya. "Suplai tambah secara otomatis pasti harganya enggak akan bisa seperti sebelumnya saat *supply* terbatas dan *demand* tinggi. Satu hal yang perlu dipahami, *nuthuk* ini kan sebenarnya kondisi yang terjadi atas dasar hukum ekonomi," katanya.

Ia berharap agar pemerintah daerah bisa melakukan pengawasan, demi menjaga kondusivitas industri pariwisata khususnya perhotelan.

Pelaku Wisata

Sementara itu, Sub Koordinator Kelompok Subsidi Promosi Kepariwisata Dispar Kabupaten Bantul, Markus Purnomo Adi, menyampaikan sebelumnya telah berkoordinasi dengan kelompok pelaku wisata di Pantai Parangtritis untuk mengantisipasi perilaku *nuthuk* harga. Beberapa pelaku wisata yang ada di sana, misalnya kelompok pemilik rumah makan, telah diberi imbauan agar mencantumkan harga makanan.

Ia juga mengimbau wisatawan dapat menanyakan harga untuk setiap makanan dan layanannya sebelumnya bertransaksi agar tidak merasa keberatan dengan harga yang diterapkan pelaku wisata.

"[Wisatawan] Jangan malu, kalau datang mau pesan minuman, tidak ada harganya, ya tanya saja. Sehingga tidak merasa *di-tuthuk*, nanti menariknya juga enak," ujarnya.

Menurut dia, setiap kelompok pelaku wisata sebelumnya telah berkoordinasi terkait dengan harga yang akan diterapkan selama libur akhir tahun. Apabila ada pelaku wisata menerapkan harga di luar kesepakatan kelompok, pelaku wisata tersebut ditegur.

"Tujuan utamanya untuk [menjaga] kenyamanan wisatawan, datang

ke [Pantai] Parangtritis aman, nyaman dan tidak kapok berkunjung," katanya.

Satgas Pungli

Peringatan pengawasan retribusi di sektor pariwisata akan dilakukan Pemkab Gunungkidul saat libur akhir tahun. Pemkab sudah berkoordinasi dengan Satgas Pungli untuk memastikan tak ada pelaku pariwisata yang *nuthuk* harga selama libur akhir tahun.

Dinpar Gunungkidul menyebut dalam Satgas Pungli itu terdapat personel Inspektorat dan Polres Gunungkidul. Lewat dua lembaga ini berbagai penyelesaian retribusi pariwisata akan ditindak dengan tegas.

Kepala Dinpar Gunungkidul, Oneng Windu Wardhana, menjelaskan peringatan pengawasan itu terutama akan dilakukan di tempat pemungutan retribusi (TPR) di wilayahnya. "Kami pastikan semua retribusi harganya sama, normal seperti sebelumnya. Tidak ada yang naik selama Natal dan Tahun Baru dan tidak ada *nuthuk* harga terutama retribusi milik pemerintah," ujarnya.

Selain retribusi masuk objek wisata, jelas Windu, tarif parkir juga akan ketat diawasi oleh Pemkab Gunungkidul. "Parkir juga ketat diawasi, tidak boleh ada yang *nuthuk* harga. Nanti akan diawasi oleh Dinas Perhubungan di mana kami sudah berkoordinasi juga," tegasnya.

Windu juga mengimbau pelaku pariwisata juga tidak *nuthuk* harga karena dampaknya buruk karena akan menurunkan kepercayaan wisatawan. "Berbagai pelaku pariwisata, terutama desa wisata juga sudah kami imbau untuk tidak melakukan kenaikan harga drastis, kalau swasta mau menaikkan harga silakan asal tidak drastis bekal lipat," ujarnya.

Selain itu, Dinpar juga sudah berkoordinasi dengan PHRI Gunungkidul untuk memastikan layanan dan harga yang diberikan terbaik. "Ini tugas bersama untuk menjaga citra wisata Gunungkidul, kalau ada peristiwa *nuthuk* harga lalu viral yang rugi malah bisa seluruh wisata," jelasnya.

Ketua PHRI Gunungkidul, Sunyata, mengaku sudah mendapat arahan dari PHRI DIY dengan tidak diperkenankan menaikkan tarif terlalu drastis. "Sudah disampaikan ke PHRI DIY bahwa maksimal kenaikan tarif 15 persen," ujarnya.

Sunyata menjelaskan para pengusaha hotel di Gunungkidul sendiri sepakat akan kebijakan tersebut. "Karena ini menyangkut citra bersama, industri perhotelan di Gunungkidul juga sedang tumbuh akan sangat disayangkan jika wisatawan kurang puas atau bahkan kecewa karena harga tidak sesuai." (r/yo Handoko)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005